



**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
2017 - 2021**





**PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
2017 - 2021**

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN PASER
MENURUT PENGELUARAN
TAHUN 2017-2021**

ISSN: 2686-4142

Nomor Publikasi: 64010.2203

Katalog BPS: 9302020.6401

Ukuran Buku: 21,0 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 60 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Gambar kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser

Dicetak oleh:

CV. Suvi Sejahtera

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

**Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser
Menurut Pengeluaran
2017-2021**

Pengarah:

Hotbel Purba, SST

Penyunting:

Willy Onesimus Siagian, S.Tr.Stat.

Penulis:

Noveranus Duma Saro, S.Tr.Stat.

Pengolah Data:

Noveranus Duma Saro, S.Tr.Stat.

Tata Letak dan Gambar Kulit:

Noveranus Duma Saro, S.Tr.Stat.

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran Tahun 2017 – 2021 merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya. Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir Kabupaten Paser. Pendekatan ini dirinci menurut beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto (Ekspor dikurangi dengan Impor).

Data yang digunakan dalam penghitungan komponen PDRB menurut Pengeluaran diperoleh dari dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun pihak swasta, juga data yang bersumber dari hasil sensus dan survei yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Diharapkan publikasi ini dapat membantu pihak perencana daerah, para analis, lembaga/instansi pemerintah lainnya serta pihak swasta.


Disadari dalam penerbitan publikasi ini, masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat penyempurnaan pada penerbitan yang akan datang. Dengan demikian saran dan kritik dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan publikasi ini, kami sampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga publikasi ini dapat bermanfaat bagi semua.

Tana Paser, April 2022

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Paser,



Hotbel Purba, SST

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xiii
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2 Kegunaan Statistik PDRB	4
1.3 Perubahan Tahun Dasar	5
BAB II Metode Estimasi dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	16
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	18
2.5 Perubahan Inventori	23
2.6 Ekspor Dan Impor	26
BAB III Tinjauan Perekonomian Kabupaten Paser 2017-2021	29
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran	31
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	37
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	39
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	40
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto	42
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	43
3.7 Perkembangan Ekspor Neto Antar Daerah	44
BAB IV Perkembangan Agregat PDRB Kabupaten Paser 2017-2021	47
4.1 PDRB ADHB (Nominal)	49

4.2 Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap Ekspor Neto	50
4.3 Perbandingan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Terhadap PMTB	51
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	52
BAB V Penutup	53
Lampiran	57

<https://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran.....	6
Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2017-2021.....	32
Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2017-2021.....	33
Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021.....	35
Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021	36
Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2017-2021.....	38
Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser, 2017-2021.....	40
Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2017-2021.....	41
Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Paser, 2017-2021..	42
Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2017-2021	43
Tabel 11. Perkembangan Ekspor Neto Barang dan Jasa Kabupaten Paser, 2017-2021.....	46
Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Paser, 2017-2021	49
Tabel 13. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2017-2021.....	50
Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2017-2021.....	51

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2017-2021	52
---	----

<https://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2017-2021	34
Gambar 2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021.....	37

<https://paserkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021	59
Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021	59
Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021	60
Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021	60



BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan dan Asuransi; (12) Real Estat; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (17) Jasa Lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori-subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud

adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga; (2) pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga; (3) pengeluaran konsumsi akhir pemerintah; (4) pembentukan modal tetap domestik bruto; (5) perubahan inventori; dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data PDRB adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian wilayah setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu wilayah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi, dan diperdagangkan dengan pihak luar wilayah.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi, dan perdagangan luar wilayah.

7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk per tahun.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

1.3 PERUBAHAN TAHUN DASAR

Perubahan tahun dasar (*Rebasing*) adalah proses penetapan kembali tahun dasar baru yang digunakan dalam pengukuran PDB. Perubahan tahun dasar perlu dilakukan karena selama sepuluh tahun terakhir banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem perdagangan internasional, dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB dari tahun 2000 menjadi 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam *System of National Accounts* (SNA) 2008. Perubahan tahun dasar dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan kabupaten/kota untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Sebagaimana disebutkan bahwa perubahan tahun dasar mengacu pada SNA 2008. SNA 2008 atau Sistem Neraca Nasional 2008 adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas ekonomi dalam hal produksi, konsumsi, dan akumulasi harta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami. Dalam sejarahnya, SNA 2008 merupakan versi yang kelima, dimana versi sebelumnya adalah SNA 1947, SNA 1953, SNA 1968, dan SNA 1993.

Dalam SNA 2008 terdapat 118 revisi dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Perubahan SNA 2008 mencakup perubahan konsep dan cakupan,

metodologi, valuasi, dan penggunaan klasifikasi. Klasifikasi PDB/PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak perubahan. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Klasifikasi PDB/PDRB Menurut Pengeluaran

PDB/PDRB Tahun Dasar 2000	PDB/PDRB Tahun Dasar 2010
(1)	(2)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor

Perubahan tahun dasar PDB/PDRB memiliki manfaat antara lain:

1. Menginformasikan perekonomian nasional/regional terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
2. Meningkatkan kualitas PDB/PDRB;
3. Menjadikan data PDB dapat diperbandingkan secara internasional.

Selanjutnya perubahan harga tahun dasar juga akan memberikan beberapa dampak, antara lain:

1. Meningkatnya nominal PDB/PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan dan pergeseran struktur ekonomi;
2. Akan mengubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
3. Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Sementara itu pemilihan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama di bidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;

4. Teridentifikasinya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDB/PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP2010) dan Indeks Harga Produsen (*Producer Price Index/PPI*);
6. Tersedianya kerangka kerja *Supply and Use Table* (SUT) yang digunakan untuk *benchmarking*/ menetapkan PDB.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan perubahan tahun dasar 2010 bisa dilihat pada publikasi PDRB Kabupaten Paser menurut Lapangan Usaha.

<https://paserkab.bps.go.id>



BAB 2

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA



2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sebagai berikut:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol;
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik;
3. Pakaian dan alas kaki;
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya;
5. Furnitur, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin;
6. Kesehatan;
7. Angkutan;
8. Komunikasi;
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan;
10. Pendidikan;
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel;
12. Barang dan jasa lainnya.

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok;
2. Pakaian dan Alas Kaki;
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga;
4. Kesehatan dan Pendidikan;
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya;
6. Hotel dan Restoran;
7. Lainnya.

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sebagai berikut:

1. Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer);
2. Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
3. Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
4. Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor).

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

1. Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
2. Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (tidak diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
3. Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
4. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PK-RT Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- 1) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan;
- 2) Jumlah penduduk pertengahan tahun;
- 3) Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu;
- 4) Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data pendukung dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besaran PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *men-deflate* PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Estimasi PK-RT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi per kapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi per kapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun.
- 2) Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
- 3) Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP;
- 4) Diperoleh nilai PK-RT ADHB yang telah di-*adjust*;
- 5) Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat) dan 7 kelompok COICOP;

- 6) PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii. Konsep dan Definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut:

1. LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
2. Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
3. Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
4. Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
5. Istilah non profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan, pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lainnya, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll;
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya;
- c. Penyusutan;
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-LNPRT bersumber dari:

- 1) Hasil Survei Khusus Lembaga Non Profit (SK-LNP)
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- 2) Hasil *updating* direktori LNPRT
Informasi yang diperoleh dari hasil *updating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- 3) Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode Penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- 1) Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\bar{x}_{ij} = \frac{\sum x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

- n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga
 i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$
 j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

2) Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

- X : PK-LNPRT atas dasar harga berlaku
 N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Dari hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah

dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan, dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi, dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) kabupaten/kota mencakup:

- a. PK-Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota bersangkutan;
- b. PK-Pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah provinsi yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;
- d. PK-Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah kabupaten/kota;

iv. Penghitungan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P tahunan adalah:

- 1) Data realisasi APBN Tahunan (Kementerian Keuangan)
- 2) Data realisasi APBD Tahunan (BPKAD)
- 3) Statistik Keuangan Daerah (BPS)

- 4) Output Bank Indonesia (BI)
- 5) Gaji Pegawai Negeri Sipil (Kementerian Keuangan dan BPKAD)
- 6) Indeks Harga dan Indeks Upah (BPS)

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P atas dasar harga berlaku} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu: Belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level kabupaten/kota, PK-P kabupaten/kota atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah kabupaten/kota itu sendiri + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan + pengeluaran pemerintah provinsi yang menjadi bagian dari kabupaten/kota yang bersangkutan.

b. PK-P Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Investasi meliputi investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa didalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii. Cakupan

PMTB terdiri dari:

- a. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidayakan (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
- b. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

- c. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber Data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri dari BPS provinsi/kabupaten/kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah Tangga (level provinsi).
- d. Laporan Keuangan Perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan,

seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di-"deflate" (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. PMTB dalam bentuk bangunan, dihitung dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-"deflate" PMTB (atas dasar harga berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara "ekstrapolasi" atau mengalikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di-"reflate" (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan, dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan, dan barang modal lain. Apabila rincian tersebut tidak tersedia, dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BPH Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk atas dasar harga konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data yang dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar;
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh;
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan Inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku maupun bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng, dan gula pasir. Bagi rumah tangga, pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material and supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah:

- a. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari hasil kegiatan survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- b. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD;
- c. Data komoditas pertambangan dari Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian;
- d. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- e. Data komoditas perkebunan;
- f. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- g. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih; dan
- h. Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut:

- a. Menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- b. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- c. Menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan meng-*inflate* perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. Men-*deflate* nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar. Keterbatasan dan masalah yang dihadapi dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah sebagai berikut:

- a. Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- b. Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- c. Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- d. Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR DAN IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri. Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor dan impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor barang dan jasa ke luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;
- b. Impor barang dan jasa dari luar negeri/propinsi/kabupaten/kota tersebut;

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya. Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Ekspor Neto.

iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber Data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$);
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$);
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI;
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi/kabupaten/kota dari hasil survei;
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia.

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non-residen. Sedangkan ekspor neto antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



BAB 3

TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN PASER 2017-2021



3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER MENURUT PENGELUARAN

Perekonomian Kabupaten Paser di tahun 2021 mengalami peningkatan nominal dibandingkan tahun sebelumnya 2020. PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku mencapai 53,99 triliun rupiah di tahun 2021 dimana angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya mencapai angka sebesar 43,24 triliun rupiah. PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,75 triliun rupiah.

Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga berlaku ini disebabkan oleh adanya peningkatan baik nilai maupun volume pengeluaran pada beberapa komponen PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku. Secara nominal, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, PMTB, dan Ekspor Neto Barang dan Jasa mengalami peningkatan dan hanya komponen Perubahan Inventori yang mengalami penurunan nilai. Hal ini lah yang menyebabkan peningkatan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku di tahun 2021.

Dari enam komponen penyusun PDRB Menurut Pengeluaran, terdapat lima komponen yang mengalami peningkatan seperti yang disebutkan sebelumnya. Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2021 mengalami peningkatan nilai sebesar 0,22 triliun rupiah dari sebelumnya di tahun 2020 sebesar 6,39 triliun rupiah menjadi 6,61 triliun rupiah di tahun 2021. Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT juga mengalami peningkatan nilai sebesar 3,88 miliar rupiah dimana pada tahun 2020 komponen ini mencapai angka 81,11 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi sebesar 84,99 miliar rupiah di tahun 2021.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan nilai sebesar 50,06 miliar rupiah dari yang sebelumnya mencapai nilai sebesar 1,59 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi sebesar 1,64 triliun pada tahun 2021. Komponen PMTB mengalami peningkatan sebesar 1,16 triliun rupiah, dimana angka ini meningkat dari nilai sebesar 8,47 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 9,63 triliun rupiah pada tahun 2021. Komponen kelima yang mengalami peningkatan adalah komponen ekspor neto dengan peningkatan sebesar 9,34 triliun rupiah, dimana komponen ini meningkat dari nilai sebesar 26,68 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi sebesar 36,02 triliun rupiah pada tahun 2021.

Komponen lainnya, yakni komponen Perubahan Inventori merupakan satu-satunya komponen yang mengalami penurunan, dimana komponen ini turun sebesar 18,79 miliar

rupiah dari angka sebesar 32,35 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,56 miliar rupiah di tahun 2021. Dapat dilihat bahwa baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, Perubahan Inventori di Kabupaten Paser menunjukkan angka yang positif. Angka yang positif ini mengimplikasikan bahwa terdapat penambahan persediaan atau inventori dalam kegiatan perekonomian Kabupaten Paser, akan tetapi penambahan persediaan tersebut di tahun 2021 melambat jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020.

Perkembangan PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga berlaku menurut komponen pengeluaran periode 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
2. Konsumsi LNPR	64,83	73,68	81,39	81,11	84,99
3. Konsumsi Pemerintah	1 280,00	1 431,55	1 592,22	1 585,89	1 635,95
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 983,04	9 673,09	9 702,38	8 471,15	9 625,40
5. Perubahan Inventori	127,61	99,33	45,30	32,35	13,56
6. Net Ekspor	28 977,49	30 897,72	30 373,04	26 676,78	36 024,56
Produk Domestik Regional Bruto	43 954,25	48 054,12	48 025,89	43 238,17	53 995,92

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Selain dilihat atas dasar harga berlaku (ADHB), PDRB menurut pengeluaran juga dilihat atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang direvaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, terutama pada peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Sehingga, menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dapat menjelaskan gambaran perkembangan naik atau turunnya keadaan perekonomian di suatu daerah atau regional.

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Paser atas dasar harga konstan 2010 periode 2017 – 2021 dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3 820,80	3 941,81	4 067,39	4 032,16	4 073,69
2. Konsumsi LNPRT	45,43	49,25	51,86	51,14	51,50
3. Konsumsi Pemerintah	752,48	832,61	920,70	895,95	910,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 942,99	7 018,84	6 569,97	5 626,97	6 266,04
5. Perubahan Inventori	101,73	72,02	32,95	23,80	8,51
6. Net Ekspor	22 474,22	22 447,53	24 091,87	24 081,79	25 278,90
Produk Domestik Regional Bruto	33 137,65	34 362,05	35 734,75	34 711,82	36 588,97

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

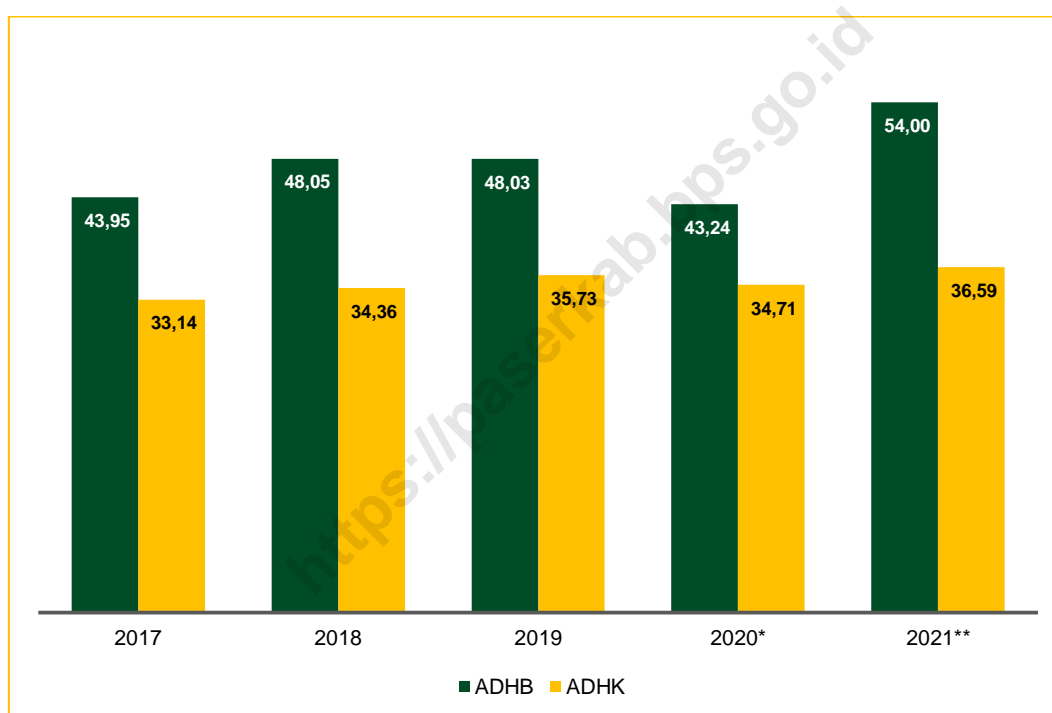
** Angka sangat sementara

Tabel 3 di atas menggambarkan perkembangan PDRB Kabupaten Paser ADHK menurut Pengeluaran periode 2017-2021. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di tahun 2017 hingga tahun 2019 PDRB ADHK Pengeluaran selalu mengalami peningkatan. Sedangkan di tahun 2020 PDRB ADHK Pengeluaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 35,73 triliun rupiah menjadi 34,71 triliun rupiah di tahun 2020. Salah satu sebab angka ini menurun di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19 yang melanda secara global tak terkecuali di Kabupaten Paser. Dampaknya dapat dilihat pada Tabel 3 dimana seluruh komponen PDRB Pengeluaran mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021, seiring menurunnya kasus COVID-19 di Kabupaten Paser, angka PDRB ADHK Pengeluaran kian meningkat sebesar 1,87 triliun rupiah dari tahun 2020 menjadi 36,58 triliun rupiah pada tahun 2021.

Pada Tabel 3 kita lihat juga bahwa komponen yang paling signifikan dalam peningkatan nilai PDRB ADHK adalah komponen Net Ekspor di tahun 2021 yang mengalami peningkatan nilai hingga 1,19 triliun rupiah dibandingkan tahun 2020. Selain itu, angka Net Ekspor pada tahun 2021 merupakan nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir. Selanjutnya kita lihat juga bahwa komponen PMTB juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2021 yaitu meningkat sebesar 639,06 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komponen lain yang mengalami peningkatan adalah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mengalami peningkatan sebesar 41,53 miliar rupiah pada tahun 2021 dari tahun 2020.

Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar 14,38 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020. Dan pada Tabel 3, komponen yang juga mengalami peningkatan adalah komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang meningkat sebesar 0,37 miliar rupiah pada tahun 2021. Selain itu, seperti yang terjadi pada PDRB ADHB, komponen Perubahan Inventori di tahun 2021 pada PDRB ADHK mengalami penurunan sebesar 15,30 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2020.

Gambar 1. Perbandingan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Triliun Rupiah), 2017-2021



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pergerakan PDRB Pengeluaran baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dari Gambar 1. PDRB ADHB cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga 2018 sebelum sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Tetapi, tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yang sangat signifikan yang mana angka pada tahun ini merupakan angka paling tinggi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. PDRB ADHK juga mengalami tren meningkat pada tahun 2017 hingga tahun 2019 sebelum mengalami penurunan nilai pada tahun 2020 dan juga mengalami peningkatan kembali di tahun 2021. Dapat dilihat juga bahwa nilai PDRB ADHB selalu

lebih tinggi dibandingkan nilai PDRB ADHK. Hal ini dikarenakan PDRB ADHB menggunakan faktor harga yang sesuai tahun bersangkutan dimana tiap tahun terdapat perubahan harga, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga tahun konstan yang dalam hal ini menggunakan tahun dasar 2010.

Terbentuknya nilai PDRB Pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor (E) atau ekspor yang dikurangi impor barang dan jasa. Kontribusi atau distribusi dari masing-masing komponen dalam PDRB Pengeluaran Kabupaten Paser dapat dilihat dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	12,56	12,23	12,98	14,78	12,24
2. Konsumsi LNPRT	0,15	0,15	0,17	0,19	0,16
3. Konsumsi Pemerintah	2,91	2,98	3,32	3,67	3,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,16	20,13	20,20	19,59	17,83
5. Perubahan Inventori	0,29	0,21	0,09	0,07	0,03
6. Net Ekspor	65,93	64,30	63,24	61,70	66,72
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa selama periode 2017-2021, PDRB Kabupaten Paser dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan distribusinya, yaitu :

1. Komponen yang memiliki kontribusi terbesar, yaitu Net Ekspor. Komponen ini sangat berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser. Pada tahun 2017-2021 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor impor, menunjukkan ekspor yang lebih tinggi dari impor, sehingga ini dapat diartikan bahwa kondisi surplus selama periode tersebut. Komponen ini memberikan kontribusi sebesar 61,70 sampai 66,72 persen selama periode 2017 hingga 2021.
2. Komponen yang memiliki kontribusi sedang, yaitu PMTB dan PK-RT. Komponen PMTB memberikan kontribusi sebesar 17,83 sampai 20,20 persen selama periode 2017-2021. Dan komponen PK-RT memiliki kontribusi sebesar 12,23 sampai 14,78 persen selama periode 2017-2021.

3. Komponen yang memiliki kontribusi kecil yaitu PK-P, PK-LNPRT dan Perubahan Inventori, yang hanya berkisar antara 0 sampai 4 persen. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pengeluaran Konsumsi LNPRT, dan Perubahan Inventori tidak terlalu memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser Menurut Pengeluaran di tahun 2017-2021.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Dari Tabel 5, dapat dilihat kondisi perekonomian Kabupaten Paser mengalami kenaikan dari tahun 2017 hingga tahun 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020. Kondisi perekonomian Kabupaten Paser tahun 2020 tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19.

Namun, kondisi ini kembali membaik dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami percepatan pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2017 adalah 1,17 persen dan kian meningkat hingga tahun 2019 mencapai angka 3,99 persen. Kemudian, angka ini mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar 2,86 persen. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, kondisi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser mengalami perbaikan dimana pada tahun 2021 angka pertumbuhan ekonomi ini tumbuh hingga menjadi 5,41 persen.

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	0,37	3,17	3,19	(0,87)	1,03
2. Konsumsi LNPRT	3,91	8,39	5,32	(1,41)	0,72
3. Konsumsi Pemerintah	(7,14)	10,65	10,58	(2,69)	1,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	18,10	(6,40)	(14,35)	11,36
Produk Domestik Regional Bruto	1,17	3,69	3,99	(2,86)	5,41

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

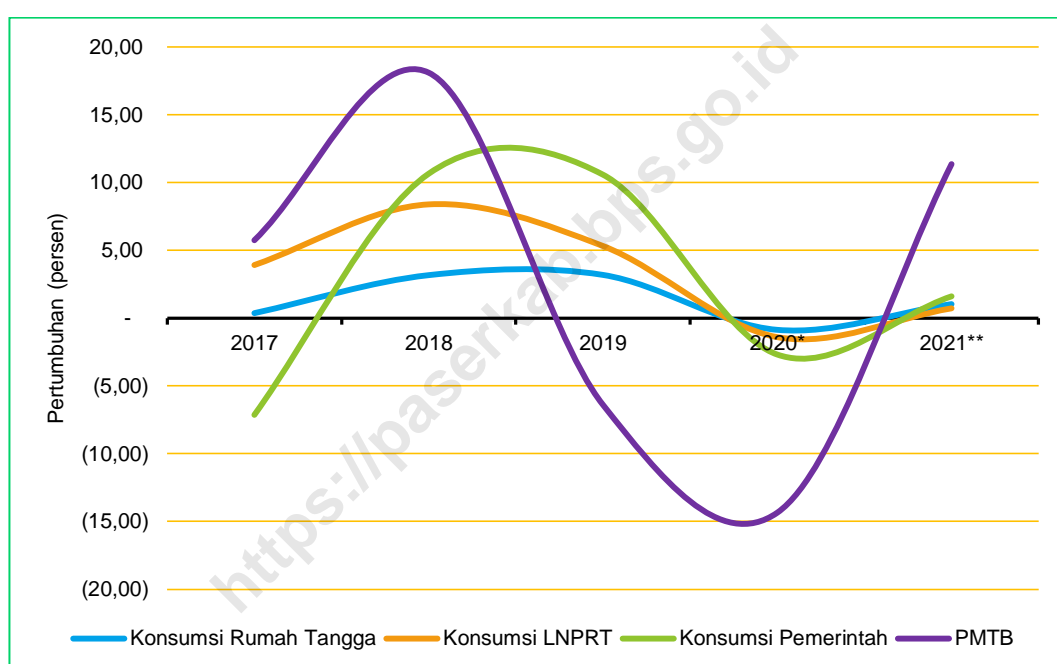
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari Tabel 5 juga dapat kita lihat pertumbuhan pada masing-masing komponen PDRB menurut Pengeluaran dari tahun 2017 hingga 2021. Visualisasi pertumbuhan untuk masing-masing komponen juga disajikan dalam Gambar 2 dibawah. Terlihat bahwa seluruh komponen memiliki tren berfluktuasi selama 5 tahun terakhir. Fluktuasi yang cukup ekstrem terjadi pada komponen PMTB dimana pada tahun 2018, komponen ini mengalami pertumbuhan hingga mencapai angka 18,10 persen dan melambat hingga mengalami

kontraksi yang cukup dalam di tahun 2019 sebesar 6,40 persen. Komponen ini kemudian mengalami kontraksi yang dalam hingga mencapai 14,35 persen pada tahun 2020, yang mana dapat kita lihat bahwa pada tahun 2020 tersebut seluruh komponen juga mengalami kontraksi. Pada tahun 2021, seluruh komponen mengalami pertumbuhan dari tahun 2020 yang seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif hingga mencapai nilai berkisar 0 hingga 11 persen, dimana terlihat bahwa komponen PMTB mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu tumbuh hingga mencapai 11,36 persen.

Gambar 2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021



Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati posisi ketiga dalam pembentukan PDRB Kabupaten Paser menurut Pengeluaran tahun 2017-2021 dibawah Net Ekspor dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Data berikut yang disajikan dalam Tabel 6 menunjukkan bahwa sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Miliar Rp)	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	3 820,80	3 941,81	4 067,39	4 032,16	4 073,69
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	12,56	12,23	12,98	14,78	12,24
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB (Ribu Rp)	20 135,53	20 997,42	22 491,57	23 234,76	23 816,32
b. ADHK 2010 (Ribu Rp)	13 934,04	14 079,15	14 680,45	14 659,36	14 674,58
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi	0,37	3,17	3,19	(0,87)	1,03
b. Konsumsi per kapita	(1,81)	1,04	4,27	(0,14)	0,10

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari Tabel 6, selama periode 2017-2021 Konsumsi Akhir Rumah Tangga mengalami peningkatan signifikan secara nominal atau atas dasar harga berlaku. Hal ini sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk selama periode tersebut. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga sehingga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Akan tetapi, tren peningkatan ini tidak diikuti dari Konsumsi Akhir Rumah Tangga secara riil atau atas dasar harga konstan. Kita lihat bahwa pada tahun 2020, angka komponen ini mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun 2019. Penurunan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi.

Pada tahun 2017, secara nominal, pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencapai angka 5,52 triliun rupiah atau sekitar 20,14 juta rupiah per orang per tahun dan angka ini terus meningkat hingga di tahun 2021 mencapai angka 6,61 triliun rupiah atau sekitar 23,82 juta rupiah per orang per tahun. Sementara itu, dapat kita lihat juga bahwa kontribusi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga terhadap PDRB dalam periode 2017-2021 mengalami fluktuasi di sekitar angka 12 hingga 14 persen. Kontribusi di tahun 2017 mencapai angka 12,56 persen dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi sebesar 12,23 persen. Kontribusi pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga ini kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi sebesar 12,98 persen dan mencapai angka 14,78 persen pada tahun 2020, sebelum akhirnya kembali turun di tahun 2021 menjadi hanya sebesar 12,24 persen.

Secara umum, rata-rata konsumsi per kapita atas dasar harga berlaku cenderung terus meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Pada tahun 2017, setiap penduduk di

Kabupaten Paser menghabiskan dana sekitar 20,14 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus meningkat hingga mencapai 23,82 juta rupiah pada tahun 2021.

Secara total, pertumbuhan pada pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan mencapai angka 0,37 persen pada tahun 2017. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga kembali membaik pada 3 tahun berikutnya yaitu mencapai angka 3,19 persen pada tahun 2019. Akan tetapi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami kontraksi sebesar 0,87 persen pada tahun 2020. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini kemudian mengalami percepatan hingga menjadi 1,03 persen di tahun 2021. Sedikit berbeda dengan pertumbuhan pada total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2017 sempat mengalami kontraksi sebesar 1,81 persen. Namun, angka ini mengalami pertumbuhan pada tahun 2018 mencapai 1,04 persen dan mengalami percepatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai angka 4,27 persen. Pengeluaran konsumsi per kapita pada tahun 2020 kembali mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen sebelum akhirnya kembali tumbuh positif di tahun 2021 menjadi sebesar 0,10 persen.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Peran Konsumsi LNPRT dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Dalam 5 tahun terakhir kontribusi Konsumsi LNPRT terhadap PDRB ADHB menurut Pengeluaran di Kabupaten Paser hanya mencapai 0,15 persen hingga 0,19 persen. Dapat kita lihat pada Tabel 7 di bawah, kontribusi pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 dan 2018 kontribusi komponen ini mencapai angka 0,15 persen dan kian meningkat pada tahun 2019 dan 2020 dengan masing-masing mencapai angka 0,17 dan 0,19 persen, sebelum akhirnya turun pada tahun 2021 menjadi 0,16 persen.

Pengeluaran konsumsi LNPRT mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2019 baik ADHB maupun ADHK dan sedikit menurun pada tahun 2020 sebelum akhirnya kembali meningkat pada tahun 2021. Dapat dilihat dari angka ADHB, angka pengeluaran ini adalah sebesar 64,83 miliar rupiah di tahun 2017 dan berfluktuasi hingga mencapai angka 84,99 pada tahun 2021. Dari segi pertumbuhan, pertumbuhan Konsumsi LNPRT atas dasar harga konstan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi LNPRT tumbuh sebesar 3,91 persen. Kemudian, pada tahun 2018 angka ini kembali tumbuh positif yang cukup signifikan menjadi angka sebesar 8,39 persen. Akan tetapi, pertumbuhan pada

komponen ini mengalami perlambatan di tahun 2019 yang hanya mencapai 5,32 persen dan kian melambat hingga mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 1,41 persen. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser, pada tahun 2021 angka pertumbuhan komponen ini mengalami percepatan hingga tumbuh positif menjadi sebesar 0,72 persen.

Tabel 7. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	64,83	73,68	81,40	81,11	84,99
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	45,43	49,25	51,86	51,14	51,50
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,15	0,15	0,17	0,19	0,16
Pertumbuhan (ADHK 2010)	3,91	8,39	5,32	(1,41)	0,72

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Paser serta perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian di bawah ini.

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah berfluktuatif baik secara nominal maupun secara riil selama lima tahun terakhir yang dapat dilihat dalam Tabel 8. Pada tahun 2017 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 1,28 triliun rupiah, kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,43 triliun rupiah pada tahun 2018 dan 1,59 triliun rupiah pada tahun 2019. Namun, angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1,59 triliun rupiah dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,64 triliun rupiah.

Apabila dicermati lebih lanjut terlihat bahwa proporsi pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terhadap PDRB cenderung mengalami peningkatan selama empat tahun terakhir. Proporsi atau kontribusi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB terus meningkat dari tahun 2017 sebesar 2,91 persen menjadi 3,67 persen pada tahun 2020 dan kontribusi komponen ini mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi hanya sebesar 3,03 persen.

Tabel 8. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 280,00	1 431,55	1 592,22	1 585,89	1 635,95
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	752,48	832,61	920,70	895,95	910,34
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	2,91	2,98	3,32	3,67	3,03
Konsumsi Pemerintah per-kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	4 668,04	5 113,13	5 746,80	5 765,67	5 893,14
b. ADHK 2010	2 744,21	2 973,87	3 323,07	3 257,34	3 279,29
Pertumbuhan (persen)					
a. Total konsumsi pemerintah	(7,14)	10,65	10,58	(2,69)	1,61
b. Konsumsi per kapita	(9,15)	8,37	11,74	(1,98)	0,67

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan penurunan pada tahun 2020, hal ini diikuti oleh adanya penurunan rata-rata konsumsi pemerintah per kapita yang dapat kita cermati dalam Tabel 8 di atas. Secara riil, pertumbuhan total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami kontraksi pada tahun 2017 sebesar 7,14 persen dan kemudian angka ini tumbuh sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi positif sebesar 10,65 persen.

Namun, pada tahun berikutnya angka ini mengalami perlambatan hingga pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,69 persen. Dan akhirnya pada tahun 2021 angka ini kembali mengalami percepatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 1,61 persen. Sejalan dengan pertumbuhan total konsumsi pemerintah, pertumbuhan pengeluaran konsumsi pemerintah per kapita juga mengalami kontraksi pada tahun 2017 sebesar 9,15 persen dan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai angka 8,37 dan 11,74 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,98 persen dan juga mengalami pertumbuhan yang positif pada tahun 2021 menjadi sebesar 0,67 persen.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Secara total, komponen PMTB mengalami fluktuasi baik ADHB maupun ADHK selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2017, komponen PMTB memiliki total nilai PDRB nominal sebesar 7,98 triliun rupiah. Nilai tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 9,67 triliun rupiah dan pada tahun 2019 terus meningkat menjadi 9,70 triliun rupiah. Akan tetapi, total PMTB sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 8,47 triliun rupiah, sebelum kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 menjadi sebesar 9,63 triliun rupiah. Adapun total PMTB secara riil juga memiliki pola perkembangan yang hampir mirip dengan pola perkembangan total PMTB nominal. Pada tahun 2017, komponen PMTB riil mencapai angka sebesar 5,94 triliun rupiah dan meningkat menjadi sebesar 7,02 triliun rupiah di tahun 2018. Namun, angka ini kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2019 hingga 2020 dimana angka pada komponen ini masing-masing menjadi sebesar 6,57 dan 5,63 triliun rupiah. Komponen ini kemudian tumbuh positif pada tahun 2021 mencapai angka 6,27 triliun rupiah.

Tabel 9. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (Miliar Rp)	7 983,04	9 673,09	9 702,38	8 471,15	9 625,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	5 942,99	7 018,84	6 569,97	5 626,97	6 266,04
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	18,16	20,13	20,20	19,59	17,83
Pertumbuhan PMTB (% ADHK)	5,74	18,10	(6,40)	(14,35)	11,36

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum, pertumbuhan dari Komponen PMTB juga berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Kita lihat dalam Tabel 9 di atas bahwa pertumbuhan komponen PMTB tumbuh positif sebesar 5,74 persen kemudian mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2018 mencapai angka sebesar 18,10 persen. Akan tetapi,

pertumbuhan pada komponen PMTB kemudian melambat hingga mengalami kontraksi sebesar 6,40 persen pada tahun 2019, dan terus mengalami kontraksi yang cukup dalam sebesar 14,35 persen pada tahun 2020. Kemudian, komponen PMTB di Kabupaten Paser ini mengalami percepatan hingga kembali tumbuh positif di tahun 2021 mencapai angka pertumbuhan sebesar 11,36 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan/atau pengurangan (bertanda negatif). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lainnya yang dapat dianalisis lebih rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah proporsinya dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif). Kondisi komponen perubahan inventori di Kabupaten Paser untuk periode tahun 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	127,61	99,33	45,30	32,35	13,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	101,73	72,02	32,95	23,80	8,51
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,29	0,21	0,09	0,07	0,03

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Secara umum, selama periode 2017-2021 nilai perubahan inventori menunjukkan tren menurun setiap tahunnya. Meskipun terjadi penambahan persediaan setiap tahun yang ditunjukkan dengan Perubahan Inventori yang selalu bernilai positif akan tetapi nilainya tidak sebesar penambahan persediaan di tahun sebelumnya. Secara nominal, total penambahan inventori di Kabupaten Paser tahun 2017 sebesar 127,61 miliar rupiah. Nilai tersebut terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2021 hanya sebesar 13,56 miliar rupiah. Sedangkan atas dasar harga konstan 2010 penambahan inventori terus menurun dari 101,73 miliar rupiah di tahun 2017 menjadi 8,51 miliar rupiah pada tahun 2021.

Penurunan tersebut juga sejalan dengan penurunan proporsi Perubahan Inventori terhadap total PDRB Kabupaten Paser selama lima tahun terakhir. Kontribusi Perubahan Inventori terhadap total PDRB Kabupaten Paser sebesar 0,29 persen pada tahun 2017 dan terus menurun menjadi 0,03 persen pada tahun 2021. Proporsi perubahan inventori terhadap PDRB pun masih dibawah satu persen dalam 5 tahun terakhir.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR NETO ANTAR DAERAH

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Aktivitas pengeluaran konsumsi (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor.

PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh perekonomian domestik Kabupaten Paser. Untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangi nilai PDRB dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut industri (sektor).

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan suatu wilayah terhadap ekonomi atau produk daerah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung

(*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Paser diluar wilayah Kabupaten Paser, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor impor antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam seri PDRB atas dasar harga konstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara total PDRB menurut pengeluaran dengan total PDRB menurut lapangan usaha.

Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung. Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*.

Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian. Kondisi perkembangan komponen ekspor neto Kabupaten Paser untuk periode 2017-2021 dapat dilihat dalam Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perkembangan Ekspor Neto Barang dan Jasa Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Ekspor Neto					
a. ADHB (Miliar Rp)	28 977,49	30 897,72	30 373,04	26 676,78	36 024,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	22 474,22	22 447,53	24 091,87	24 081,79	25 278,90
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	65,93	64,30	63,24	61,70	66,72

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Dari Tabel 11 dapat kita lihat bahwa Ekspor Neto memiliki nilai yang cenderung fluktuatif selama periode 2017-2021. Total Ekspor Neto selalu menunjukkan nilai positif dari tahun ke tahun yang artinya total nilai ekspor Kabupaten Paser lebih besar nilainya dibandingkan total impornya. Hal ini terjadi baik dari segi total Ekspor Neto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Total ekspor neto secara nominal pada tahun 2017 mencapai angka sebesar 28,98 triliun rupiah dan kemudian mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi sebesar 30,89 triliun rupiah. Lalu, angka ini mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2020 yang cukup dalam menjadi hanya sebesar 26,68 triliun rupiah. Komponen ekspor neto ini kembali meningkat di tahun 2021 menjadi sebesar 36,02 triliun rupiah. Pola perkembangan yang sama juga terjadi dalam perkembangan nilai ekspor neto secara riil, dimana angka ini pada tahun 2017 mencapai angka sebesar 22,47 triliun rupiah dan kemudian mengalami fluktuasi hingga di tahun 2021 menjadi sebesar 25,28 triliun rupiah.

Indikator selanjutnya yang dapat kita lihat dalam Tabel 11 adalah proporsi Ekspor Neto terhadap PDRB selama lima tahun terakhir yang selalu berada diatas 60 persen. Hal ini juga menunjukkan bahwa Ekspor Neto memberikan kontribusi paling besar dibandingkan komponen lainnya. Kontribusi Ekspor Neto pada tahun 2017 sebesar 65,93 persen dan pada tahun-tahun berikutnya, proporsi kontribusi dari komponen PMTB ini kian menurun hingga pada tahun 2020 hanya mencapai angka sebesar 61,70 persen. Lalu, pada tahun 2021 angka ini kembali mengalami peningkatan proporsi menjadi sebesar 66,72 persen.



BAB 4

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB KABUPATEN PASER 2017-2021



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Uraian berikut ini akan menyajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB ADHB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan atau dikonsumsi di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, yang di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Sebagai contoh, untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, maka disajikan data PDRB per kapita. Tabel 12 di bawah ini menunjukkan perkembangan nilai PDRB Kabupaten Paser dalam periode 2017-2021.

Tabel 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	43 954,25	48 054,12	48 025,89	43 238,17	53 995,92
- ADHK 2010	33 137,65	34 362,05	35 734,75	34 711,82	36 588,97
PDRB per kapita (Ribu Rp)					
- ADHB	160 296,47	171 637,17	173 339,87	157 197,11	194 508,39
- ADHK 2010	120 849,47	122 732,58	128 977,44	126 198,64	131 803,71
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	-1,03	1,56	5,09	(2,15)	4,44

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

PDRB per kapita Kabupaten Paser secara nominal berfluktuatif dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dalam Tabel 12 di atas. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Kabupaten Paser rata-rata mampu menciptakan PDRB (atau nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Dalam periode lima tahun terakhir, PDRB per kapita terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 157,19 juta

rupiah dan tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 194,51 juta rupiah. Sementara itu, PDRB per kapita secara riil di Kabupaten Paser sempat mengalami kontraksi pada tahun 2017 sebesar 1,03 sebelum mengalami percepatan hingga di tahun 2019 mencapai angka pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Namun, angka ini mengalami kontraksi pada tahun 2020 sebesar 2,15 persen. Kemudian, PDRB per kapita secara riil di Kabupaten Paser mengalami percepatan kembali hingga tumbuh positif pada tahun 2021 menjadi 4,44 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR NETO

Indikator ini menunjukkan perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor. Selama ini ekspor neto Kabupaten Paser mempunyai kontribusi tertinggi dalam penggunaan PDRB Kabupaten Paser. Pada tahun 2021 kontribusi komponen ini mencapai angka sebesar 66,72 persen, yang artinya bahwa produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Paser sebagian besar digunakan untuk ekspor dibandingkan dengan dikonsumsi oleh rumah tangga. Tabel 13 berikut ini menunjukkan perbandingan antara pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dan juga ekspor neto di Kabupaten Paser pada periode 2017-2021.

Tabel 13. Perbandingan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor Neto Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total konsumsi rumah tangga (ADHB) (Miliar Rp)	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
Total ekspor neto (ADHB) (Miliar Rp)	28 977,49	30 897,72	30 373,04	26 676,78	36 024,56
Kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB (persen)	12,56	12,23	12,98	14,78	12,24
Kontribusi ekspor neto terhadap PDRB (persen)	65,93	64,30	63,24	61,70	66,72
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Ekspor Neto	0,19	0,19	0,21	0,24	0,18

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Ekspor neto sendiri didapatkan dari selisih total ekspor antar daerah dengan impor. Ekspor neto yang positif menandakan bahwa ekspor pada daerah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan impor. Jika dilihat dari Tabel 13 di atas, dapat kita lihat bahwa komponen ekspor neto memiliki kontribusi di atas 60 persen dalam 5 tahun terakhir sedangkan kontribusi dari konsumsi rumah tangga yang selalu kurang dari 15 persen dalam

5 tahun terakhir, maka diketahui bahwa pola ekspor di Kabupaten Paser sangat jauh di atas konsumsi rumah tangga Kabupaten Paser dalam PDRB.

Selain itu, dapat kita lihat juga dalam tabel tersebut bahwa pada tahun 2017 dan 2018 perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga adalah 0,19 kali dari ekspor neto. Hal ini berarti masih sedikit sekali penyediaan (*supply*) domestik yang diserap untuk konsumsi rumah tangga. Rasio total konsumsi rumah tangga terhadap ekspor neto pada tahun-tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan pada tahun 2019 (0,21) dan pada tahun 2020 (0,24). Namun, di tahun berikutnya yaitu tahun 2021, rasio ini kembali turun menjadi hanya sebesar 0,18.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Rasio ini merupakan perbandingan antara produk yang digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto). Sekilas Nampak bahwa penggunaan produk yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Paser masih lebih tinggi untuk penggunaan pada PMTB dibandingkan konsumsi akhir rumah tangga. Hal tersebut cukup bagus mengingat bahwa perekonomian suatu wilayah yang utamanya digerakkan oleh aktivitas ekonomi konsumsi bersifat rentan. Sedangkan perekonomian yang digerakkan oleh aktivitas investasi, dalam jangka panjang akan mendorong meningkatnya kapasitas produksi yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan. Tabel 14 menunjukkan bahwa produk yang digunakan untuk investasi fisik di Kabupaten Paser lebih besar dibandingkan dengan produk yang digunakan untuk konsumsi rumah tangga.

Tabel 14. Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga (Miliar Rupiah)	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
Total PMTB (Miliar Rupiah)	7 983,04	9 673,09	9 702,38	8 471,15	9 625,40
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB	0,69	0,61	0,64	0,75	0,69

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2017, rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB sebesar 0,69 kemudian menurun

menjadi 0,61 pada tahun 2018. Lalu, angka ini mengalami peningkatan menjadi 0,64 dan 0,75 pada tahun 2019 dan 2020. Namun, angka rasio ini kembali menurun di tahun 2021 menjadi hanya sebesar 0,69.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Proporsi penggunaan untuk konsumsi akhir terhadap PDRB nominal Kabupaten Paser ditampilkan pada Tabel 15 berikut ini.

Tabel 15. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Paser, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rupiah)					
a. Rumah tangga	5 521,28	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,46
b. LNPRT	64,83	73,68	81,39	81,11	84,99
c. Pemerintah	1 280,00	1 431,55	1 592,22	1 585,89	1 635,95
Jumlah	6 866,12	7 383,98	7 905,17	8 057,89	8 332,39
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	43 954,25	48 054,12	48 025,89	43 238,17	53 995,92
Proporsi (Persen)	15,62	15,37	16,46	18,64	15,43

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Pada Tabel 15 diatas, terlihat bahwa proporsi total pengeluaran konsumsi akhir di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 18,64 persen dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 16,46 persen. Tetapi, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 15,43 persen pada tahun 2021. Dilihat dari proporsi total pengeluaran konsumsi akhir selama periode tahun 2017-2021, sebagian besar barang dan jasa yang berada di wilayah domestik Kabupaten Paser untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir berkisar pada 15 hingga 18 persen. Pada tahun 2020, proporsi total pengeluaran konsumsi akhir merupakan proporsi tertinggi yang terjadi selama lima tahun terakhir. Setiap tahunnya, pengeluaran konsumsi akhir yang paling besar ialah untuk pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga setelah itu disusul pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, dan yang paling sedikit adalah konsumsi akhir LNPRT.



BAB 5

PENUTUP



PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2017 – 2021 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Paser pada periode yang bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Nilai nominal PDRB Kabupaten Paser pada tahun 2021 mencapai 53,99 triliun rupiah yang sebagian besar masih didominasi oleh aktivitas ekspor neto. Sementara itu, secara riil nilai PDRB Kabupaten Paser sebesar 36,59 triliun rupiah dimana angka ini naik sebesar 1,88 triliun rupiah.
3. Secara riil, seluruh komponen PDRB pengeluaran terkoreksi positif pada tahun 2021. Pertumbuhan dengan nilai paling tinggi pada tahun 2021 terjadi pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yaitu sebesar 11,36 persen.
4. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Paser mengalami fluktuasi pada periode 2017-2021. Pada tahun 2017 pertumbuhan PDRB per kapita mengalami kontraksi sebesar 1,03 persen. Kemudian mengalami percepatan di tahun 2018 mencapai angka 1,56 persen dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai angka sebesar 5,09 persen. Namun, angka ini mengalami kontraksi sebesar 2,15 persen pada tahun 2020. Dan, angka ini kembali mengalami percepatan hingga tumbuh positif menjadi 4,44 persen pada tahun 2021.
5. Rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor neto pada tahun 2021 adalah sebesar 0,18 dimana sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi di Kabupaten Paser lebih banyak untuk diekspor daripada untuk konsumsi rumah tangga. Sedangkan untuk rasio konsumsi rumah tangga terhadap PMTB adalah sebesar 0,69 pada tahun 2021. Hal ini menandakan bahwa nilai produk yang digunakan untuk investasi lebih banyak dibandingkan untuk konsumsi rumah tangga.
6. Pada periode 2017-2021, proporsi total konsumsi akhir terhadap PDRB mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 angka ini mencapai 15,62 persen dan sempat mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 18,64 persen. Dan angka ini kembali turun menjadi 15,43 persen pada tahun 2021.



LAMPIRAN



Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 521 284,06	5 878 752,42	6 231 558,24	6 390 884,33	6 611 459,29
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	64 828,81	73 684,23	81 396,67	81 113,88	84 989,80
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 280 004,22	1 431 548,17	1 592 219,86	1 585 887,67	1 635 946,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 983 044,27	9 673 089,35	9 702 376,46	8 471 149,09	9 625 400,65
5. Perubahan Inventori	127 606,72	99 326,68	45 300,83	32 350,03	13 559,82
6. Net Ekspor	28 977 486,76	30 897 716,84	30 373 039,14	26 676 780,67	36 024 562,24
Produk Domestik Regional Bruto	43 954 254,84	48 054 117,69	48 025 891,19	43 238 165,66	53 995 918,57

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 2. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 820 797,84	3 941 810,68	4 067 393,67	4 032 160,62	4 073 693,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	45 434,95	49 245,48	51 864,46	51 135,73	51 503,70
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	752 479,08	832 608,05	920 696,89	895 953,25	910 337,13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5 942 994,50	7 018 842,38	6 569 973,26	5 626 972,76	6 266 037,16
5. Perubahan Inventori	101 727,35	72 016,23	32 949,53	23 800,86	8 505,34
6. Net Ekspor	22 474 216,97	22 447 531,74	24 091 870,92	24 081 794,98	25 278 895,28
Produk Domestik Regional Bruto	33 137 650,69	34 362 054,56	35 734 748,73	34 711 818,19	36 588 972,34

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	12,56	12,23	12,98	14,78	12,24
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,15	0,15	0,17	0,19	0,16
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,91	2,98	3,32	3,67	3,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	18,16	20,13	20,20	19,59	17,83
5. Perubahan Inventori	0,29	0,21	0,09	0,07	0,03
6. Net Ekspor	65,93	64,30	63,24	61,70	66,72
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen), 2017-2021

Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	0,37	3,17	3,19	(0,87)	1,03
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,91	8,39	5,32	(1,41)	0,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(7,14)	10,65	10,58	(2,69)	1,61
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,74	18,10	(6,40)	(14,35)	11,36
Produk Domestik Regional Bruto	1,17	3,69	3,99	(2,86)	5,41

Sumber: Diolah dari Hasil Sensus, Survei dan Berbagai Sumber Lainnya

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PASER**

Jl Gajah Mada No.76 Tana Paser

Telp. : (0543) 21219

Email : bps6401@bps.go.id

Homepage : paserkab.bps.go.id

ISSN 2686-4142



9 772686 414006